

**PERSEPEKTIF MUBADALAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN
NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

Skripsi

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Muhammad Sofyan Yusuf
NPM : 1621020579**

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PERSEPEKTIF MUBADALAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NO.
9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL**

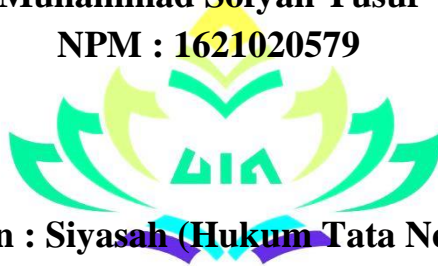
Skripsi

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Muhammad Sofyan Yusuf

NPM : 1621020579



Jurusan : Siyasa (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Drs. Susiadi As., M.Sos.I

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Perempuan sering di kategorikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki, baik diranah publik maupun domestik termasuk dalam sektor pendidikan, politik, keteenagakerjaan bahkan dalam ranah keluarga. Ini merupakan salah satu dan serangkaian bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan akibat sistem patriarkhi yang di representasikan oleh kultur budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat sejak jaman kolonial hingga sekarang. Sejak diberlakukannya Impres No.9 Tahun 2000 Indonesia terus berupaya memproduksi aturan hukum dalam kerangka pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Berkenaan dengan itu prespektif mubadalah sebagai alternatif penafsiran tekstual agama dalam relasi gender menjadi penting untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berwawasan gender dengan dasar keyakinan agama. Berdasarkan uraian di atas, fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana upaya pemerintah dalam mengaplikasikan Inpres No.9 Tahun 2000 dan bagaimana pengarusutamaan gender terhadap Inpres No.9 Tahun 2000 dalam perspektif mubadalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Inpres No.9 Tahun 2000 dan relevansinya pandangan Mubadalah terhadap Inpres No.9 Tahun 2000.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana cara kerja dari metode ini adalah menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin term pembahasan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang di dalamnya mengatur tentang isu kesetaraan gender baik dalam ruang lingkup umum seperti masyarakat, politik, pekerjaan, pendidikan dan juga dalam keluarga. Sedangkan dalam perspektif mubadalah, Kebijakan Inpres No. 9 Tahun 2000 memiliki korelasi dengan Qs. An-Nisa' ayat 124 yang menjadi dasar argumen kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dan tetap menjaga etika dan perilaku yang positif, serta tidak melanggar ketentuan syari'at agama.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Sofyan Yusuf**

NPM : **16210205749**

Jurusan : **Siyasah (Hukum Tata Negara)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden
No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

NIP.196706041997032004

Pembimbing II

Drs. Susiadi As., M.Sos.I

NIP. 195612051983031002

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyyah

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukaramo I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional)”** disusun oleh **Muhammad Sofyan Yusuf, NPM. 1621020579**, Program Studi **Siyasah Syar’iyyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 17 Januari 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Kumaedi Ja’far, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Jayusman, S.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji II : Drs. Susiadi, AS, M.Sos.I. (.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Hainuruddin, M.H.
NPM. 162102199930311002.



MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S An-Nisa ' : 124)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua saya Muchlison dan Siti Aminah, kepada adik saya Nur Sania Sismega Sari, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
2. Rekan-rekan kelas unggulan angkatan pertama (2016) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 13 Juni 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muchlison dan Siti Aminah.

Jenjang pendidikan penulis antara lain;

1. TK Pertiwi lulus pada tahun 2002
2. MI Miftahul lulus pada tahun 2008
3. MTs Madinah Karyatani lulus pada tahun 2011
4. MA Madinah lulus pada tahun 2014
5. Pondok Pesantren Madinah lulus pada tahun 2015
6. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Siyasah Syar'iyah, Terdaftar Pada Tahun 2016.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Susiadi As., M.Sos.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nurnazli, S.H, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syar'iyah.
6. Segenap rekan-rekan angkatan 2016 khususnya kelas unggulan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Dan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita, dan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Bandar Lampung, 13
Desember 2019



Muhammad Sofyan
Yusuf
NPM. 1621020579

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Telaah Pustaka	9
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI MUBADALAH

A. Latar Belakang Lahirnya Teori Mubadalah	19
B. Konsep Mubadalah.....	22
C. Fungsi Mubadalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga, Sosial dan Politik	26

BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER MENURUT INPRES NO.9 TAHUN 2000

A. Latar Belakang Lahirnya Inpres No.9 Tahun 2000.....	51
B. Konsep dan Tujuan Pengarusutamaan Gender Menurut Inpres No.9 Tahun 2000.....	55

BAB IV PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH

A. Konsep Pengarusutamaan Gender Menurut Inpres No.9 Tahun 2000.....	57
B. Pengarusutamaan Gender Terhadap Inpres No.9 Tahun 2000 dalam Perspektif Mubadalah.....	73

BAB V PENUTUP

A. Penutup.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“PERSEPEKTIF MUBADALAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL”**. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Mubadalah adalah media Islam dan relasi kesalingan antar individu maupun kelompok, terutama antara laki-laki dan perempuan. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Mubaadalah hadir untuk untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan prempuan, pada tataran praktek kehidupan sehari-hari, dalam keluarga maupun bermasyarakat.¹
2. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah peraturan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berisi tentang pengarusutamaan atau kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.²

B. Alasan Memilih Judul

¹ “Memahami Konsep Kesalingan”, (On-line), tersedia di: <https://www.cari-ustadz.org/blog/2019/01/27/milenial-paham-mubadalah/>, (3 desember 2019).

² “Pengertian Instruksi Presiden”, (On-line), tersedia di: <https://kbbi.kata.web.id/instruksi-presiden>, (6 Mei 2019).

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam kehidupan sosial, sehingga perlu ada upaya pemerataan dan kesetaraan agar keduanya berjalan seimbang dan adil.³
- b. Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja dan beramal menurut kemampuan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada keduanya. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk saling membantu, membina dan mengasihi antara satu dengan yang lainnya.⁴

2. Alasan Subjektif

- a. Banyak terdapat referensi atau buku-buku yang mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
- b. Pokok bahasan ini ada relevansinya dengan jurusan penulis yakni Syiasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) serta tersedianya literatur yang mendukung.



C. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan.⁵ Aturannya

³ Fitria Ani, Sosial dan Gender, *Jurnal Masyarakat*, Vol 2 No. 5, (2016), h 33.

⁴ Lomba Sultan, "Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender", *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 8 No. 1, (2015), h.73.

⁵ Wewen Kusuma Rahayu, "Ananlisis Pengarustamaan Gender dalam Kebijakan Publik", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2016), h. 94.

tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁶

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama yang dijamin oleh Undang-Undang yang berlaku dinegara Indonesia, sehingga keduanya mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan kebebasan dan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi. Kehidupan masyarakat yang sarat dengan berbagai macam kultur dan budaya, menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap relasi laki-laki dan perempuan.

Perempuan sering dikategorikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “setiap orang di lahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”⁷

Kebudayaan masyarakat dinegara-negara berkembang didominasi kuat peran laki-laki atau disebut budaya patriarki, sehingga posisi laki-laki dan perempuan tidak setara.⁸ Pandangan ini yang memunculkan perbedaan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebudayaan yang mereka miliki.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (1).

⁸ Waston Malau, “Pengarustamaan Gender Dalam Program Pembangunan”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6 No.2, (2014), h. 126.

Salah satu contoh adalah peran wanita dalam perpolitikan, kaum perempuan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sudah banyak pemimpin dunia yang tampil tidak kalah hebatnya dengan pria, sebut saja misalnya, Margaret Thatcher dari Inggris, Benazir Butto dari Pakistan, Megawati Soekarno Putri dari Indonesia, Helary Clinton dari Amerika, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁹

Politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan di maksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.¹⁰

Sebagai salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan.¹¹ Diakui atau tidak, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti imamah, perwakilan, kementrian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Permasalahannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum.¹²

Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang keikutsertaan perempuan dalam dunia politik yang ada, yaitu salah satunya diatur dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional

⁹ Sidi Ritaudin, "Kesenjangan Gender", (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M, 2015), h.1.

¹⁰ Liky Faizal, "Perempuan dalam Politik", *Jurnal TAPIS* Vol.12, No.1, (2016), h.94.

¹¹ Termaginalkan yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil.

¹² *Ibid.*, H.95.

presiden republik indonesia. Yang mana didalamnya dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Peran dan kedudukan perempuan sarannya ialah untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan keluarganya, meningkatkan peran ganda perempuan dalam pembinaan keluarga dan peran sertanya yang aktif di masyarakat secara serasi dan seimbang dalam mempertinggi harkat dan martabat perempuan.¹³

Selanjutnya masih kuatnya pandangan-pandangan bahwa perempuan lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki, atau pandangan bahwa perempuan lebih menggunakan perasaannya dari pada rasional, sehingga perempuan tidak cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang keras dan rasional termasuk bidang politik yang di anggap hanya cocok dengan laki-laki. Ini merupakan gambaran mengenai adanya diskriminasi klasik terhadap perempuan.¹⁴

Pemerataan terhadap hak-hak warga negara sangat di perlukan untuk semua warganya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pemerintah yang dalam hal ini menjadi pelaksana peraturan

¹³ St. Habibah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender”, Jurnal Sosioreligius Vol. 1, No. 1, 2015, H.104.

¹⁴ *Ibid.*, H.103.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar diatas, dalam masalah ini diuraikan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Pengarusutamaan Gender Menurut Inpres No.9 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana Pengarustamaan Gender Terhadap Inpres No.9 Tahun 2000 dalam Persepektif Mubadalah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Inpres No.9 Tahun 2000 yang dilakukan oleh pemerintah dari pertama dikeluarkannya sampai dengan sekarang.
- b. Untuk mengetahui pandangan Mubadalah terhadap Inpres No.9 Tahun 2000.

2. Kegunaan penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama ilmu Siyasah Syar'iyah pada umumnya dan khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang

diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Siyasah Syar'iyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Kerangka Teori

Pembahasan pokok dalam penelitian ini terdiri dari historisitas tentang relasi perempuan dan laki-laki, Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Point-point tersebut akan dijabarkan dalam bentuk yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memecahkan masalah yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Ketiga bagian tersebut dapat di konstruksikan sebagai berikut:

1. Dasar-dasar yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teori Mubadalah. Mubadalah berasal dari bahasa arab مُبَادَلَةٌ yang berarti mengganti, mengubah, menukar atau bisa juga di artikan sebagai kesetaraan.

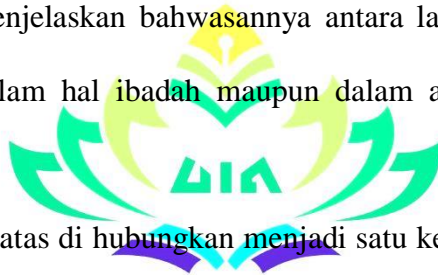
Kesetaraan yang dimaksud adalah hubungan dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memang mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kodratnya, seperti halnya seorang istri dalam keluarga yang berperan mengurus rumah tangga, anak keuangan dan lain sebagainya, dan suami yang mempunyai lebih banyak tugas dan tanggung jawab di luar rumah, seperti bekerja dan mencari nafkah. Namun di lain waktu dan tempat, keduanya juga saling membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul di dalam aktifitas sosialnya.

2. Dalam islam, kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan telah di jelaskan dalam al-quran.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya antara laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial (urusan karir profesional).



3. Pokok-pokok diatas di hubungan menjadi satu kesatuan yang utuh guna memperoleh pemahaman terkait peran perempuan dalam menjadi pemimpin yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan dibahas dalam bab-bab skripsi ini secara sistematis. Selanjutnya metode dalam menulis penelitian ini dengan menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah yang berkaitan tentang kepemimpinan, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Data awal diperoleh dari hasil pembacaan teks, konteks dan fenomena dianalisa secara bertahap dan mendalam sesuai dengan metode, teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁵ Q.S Al-Hujurat, 13.

- b. Hasil analisa datanya dituangkan pada pembahasan sebagai upaya untuk memberikan jawaban rumusan masalah yang dituangkan pada kesimpulan dalam penelitian ini.
- c. Dalam penulisannya, teori Fiqh Siyasah digunakan untuk memotret peran perempuan dalam menjadi pemimpin.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan penulis teliti:

Pertama Yudha Septian, 2011, yang berjudul *“Pandangan Politisi Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kesetaraan Gender*. Dalam penelitian ini membahas bahwa kesetaraan gender merupakan aroma pemberontakan yang dilakukan oleh kaum wanita yang menuntut akan adanya kesetaraan, kesamaan, dan tidak membedakan antara peran wanita dan laki-laki. Karena sering di temukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa wanita sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ini merupakan faktor pemicu lahirnya gerakan-gerakan yang menuntut akan adanya persamaan hak antara wanita dan laki-laki (gerakan *feminis*).¹⁶

¹⁶ Yudha Septian, “Pandangan Politisi Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kesetaraan Gender”. (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Syraif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 96

Kedua Ifa Chaerunnisyah, 2016, yang berjudul “*Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender di desa buku kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar provinsi sulawesi barat*”. Dalam skripsi ini disimpulkan kesetaraan gender sangat bagus diterapkan dalam rumah tangga, karena adil dalam pembagian kerja dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kesetaraan gender didesa buku adalah saling pengertian, saling bertanggung jawab, saling ikhlas, penuh dengan kasih sayang, harmonis, adil demi kelanggengan dan kesejahteraan rumah tangga dan dalam masyarakat.¹⁷

Ketiga Samsul Zakaria, 2013, yang berjudul “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musda Mulia)*”. Dalam jurnal ini di ambil kesimpulan dari hasil studi komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musda Mulia. Menurut KH. Husein Muhammad, perempuan saat ini memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang di miliki laki-laki, dan karena sebab itu perempuan menjadi mungkin untuk menjadi pemimpin. Sementara menurut Prof. Siti Musda Mulia, ketika seorang menjadi pemimpin, maka ia tidak serta merta harus mengubah citranya menjadi laki-laki yang di kenal tegas dan berwibawa. Sebab, kepemimpinan juga ideal dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, yang mana hal tersebut sesuai dengan tabiat perempuan.¹⁸

¹⁷ Ifa Chaerunnisyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat”. (Skripsi Program Sarjana Sosial UIN Alauddin, Makassar, 2016), h.63.

¹⁸ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musda Mulia)”, *Jurnal Khazanah*, Vol.6 No.1, 2013, h.94.

Beberapa tulisan yang membedakan dengan skripsi ini adalah merujuk pada judul Penelitian “Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Persepektif Mubadalah (Analisis Inpres No. 9 Tahun 2000)”, dalam penelitian ini lebih fokus terhadap analisis Inpres No.9 Tahun 2000 yang berlaku dan mengatur tentang kesetaraan gender di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, yakni buku-buku, majalah, jurnal.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, dan dibutuhkan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁹

Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan terkait dengan pokok permasalahan Pengarustamaan

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum* (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.10.

Gender (Pug) Dalam Persepektif Mubadalah (Analisis Inpres No. 9 Tahun 2000).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan terkait materi yang penulis pilih.

2. Sumber Data

a. Data Primer



Tekhnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dengan cara meneliti, menelaah dan memahami Inpres No.9 Tahun 2000 dan undang-undang yang terkait dengan judul penelitian ini yang di jadikan sebagai sumber data primer.²¹

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet. Ke VII, h.105.

²¹ H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.115.

Sedangkan data tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan data sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedi, catalog, gambar, video, daftar pustaka buku, potongan majalah, koran dan juga catatan harian.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat di perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini di gunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer, sekunder maupun tersier.



4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain²³:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah relevan dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Sistemasi (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

5. Analisis Data

²² *Ibid.*

²³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, h.7.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Di mana metode berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian di teliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²⁴




²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: citra aditia bakti, 2004), h.127.

BAB II

LANDASAN TEORI MUBADALAH

A. Latar Belakang Lahirnya Teori Mubadalah

Eksistensi dan peran ulama perempuan di Indonesia tidak banyak diketahui karena minimnya dokumentasi dan publikasi mengenai isu ini. Untuk pertama kalinya pada 25-27 April 2017 lalu, para ulama wanita berkumpul membahas masalah-masalah kontekstual terkait kaum hawa dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI yang I, di Pesantren Kebon Jambu al-Islami, Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini dihadiri sekitar 1.280 ulama dan cendekia perempuan dari seluruh penjuru tanah air.²⁵



Kongres yang dilaksanakan di salah satu Pesantren yang ada di Jawa Barat tersebut menghasilkan beberapa hal penting. Pertama, ada pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama perempuan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) berhasil mengeluarkan fatwa atas tiga isu besar, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam.

Kesadaran akan relasi sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat telah melahirkan sebuah gerakan feminisme. Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan

²⁵“Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa”, (On-line), tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>, (4 Desember 2019).

penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, keluarga, dan dalam tempat kerja.²⁶

Jauh sebelum gagasan tentang feminisme muncul, islam datang dengan membawa misi perubahan sosial, memperkenalkan, mengajarkan dan merubah paham masyarakat terhadap perempuan yang dulunya di anggap sebagai barang, setengah manusia atau makhluk kelas dua dari pada laki-laki, menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, agar semua manusia mendapatkan perlakuan adil dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan.

Adil yang dalam bahasa arab berasal dari kata '*Adl*' yang mempunyai arti secara umum tidak berpihak kepada siapapun²⁷. Maka antara laki-laki dan perempuan harus memperoleh hak nya masing-masing tanpa adanya perbedaan jenis kelamin dalam semua aspek kehidupan.

Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitu juga manusia, di ciptakan dengan kodratnya berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada laki-laki maupun perempuan. Allah memang menciptakan keduanya dengan kodrat yang berbeda, namun seharusnya perbedaan tersebut tidak membuat kedudukan perempuan dalam islam menjadi jauh di bawah laki-laki.

Kodrat perempuan yang di anggap di bawah laki-laki tak jarang di jadikan sebagai alasan untuk merampas hak dan peran perempuan dalam keluarga maupun

²⁶ Rhima Swara, Mentransformasikan Nilai-Nilai Keadilan dan Kesetaraan.

²⁷ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang, Intrans Publishing, 2017), h 18.

dalam lingkungan masyarakat. Laki-laki di anggap sebagai seorang yang lebih kuat, lebih dominan dan lebih berkuasa atas segala hal, sehingga ruang gerak perempuan menjadi sangat terbatas dan akhirnya banyak yang beranggapan bahwa perempuan hanya bisa andil dalam urusan rumah tangga dan harus tunduk di bawah perintah laki-laki.

Kodrat seorang perempuan memang memiliki fisik yang tidak sekuat laki-laki, namun bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan hal lain selain kegiatan mengurus rumah tangga. Islam menganggap perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, meskipun tidak dalam segala hal, maka dari itu kesetaraan gender dalam islam di perbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan dan kodrat sebagai perempuan dan tidak membuat mereka melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan.²⁸

Al-Quran dan hadits telah menjelaskan bahwa agama islam bukanlah agama yang diskriminasi terhadap perempuan, justru perempuan di anggap memiliki keistimewaan yang tidak di miliki oleh laki-laki di hadapan Allah, laki-laki maupun perempuan memiliki derajat sama tanpa ada perbedaan gender di antara keduanya.

Berikut adalah beberapa pandangan Islam tentang kesetaraan gender

1. Kesetaraan gender di perbolehkan dalam islam

Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang melarang tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender memang di perbolehkan selama tidak berlebihan. Dan kesetaraan gender yang di perbolehkan dalam

²⁸ Haryanto, Sosial dalam Islam, (Jakarta, Mediakarya, 2015), h 45.

Islam tidak lantas membuat perempuan menjadi pemimpin dalam segala hal, laki-laki tetaplah pemimpin atau rois bagi perempuan dalam kehidupan ini.

2. Laki-laki berkewajiban sebagai pemimpin atau kepala keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga laki-laki tetap memegang kendali sebagai pemimpin atas istri dan anak-anaknya, dan seorang wanita (istri) harus taat dan patuh terhadap laki-laki (suaminya). Seorang suami wajib menafkahi seluruh anggota keluarganya secara lahiriyah dan batiniyah serta melindungi keluarganya dari segala hal yang tidak baik.

3. Perempuan diperbolehkan menuntut ilmu setinggi-tingginya

Sebelum adanya kesetaraan gender, perempuan tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu, dengan alasan bahwa perempuan tugasnya mengurus pekerjaan rumah, jadi mereka (perempuan) tidak perlu memiliki ilmu. Paham di masyarakat yang seperti tidak dibenarkan, karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua orang.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَالْمُسْلِمَاتِ²⁹

Dan perempuan pun juga membutuhkan ilmu untuk berkembang dalam kehidupannya, di samping itu seorang perempuan yang sudah

²⁹ [Hadits *shahih li ghairihi*, diriwayatkan Ibnu Majah (no. 224), dari jalur Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*. Hadits ini diriwayatkan pula oleh sekelompok para shahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudriy, Al-Husain bin 'Ali, dan Jabir *radhiyallahu 'anhum*. Para ulama ahli hadits telah menerangkan jalur-jalur hadits ini dalam kitab-kitab mereka, seperti: Imam As-Suyuthi dalam kitab *Juz Thuruqi Hadits Tholabil Ilmi Faridhotun 'Ala Kulli Muslimin*, Imam Ibnul Jauzi dalam kitab *Al-Wahiyat* (I/67-71), Imam Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlili* (I/69-97), dan Syaikh Al-Albani dalam kitab *Takhrij Musykilah Al-Faqr* (hal. 48-62)]

berkeluarga pasti akan mengurus anak, maka ilmu yang di miliknya pun nantinya bisa di ajarkan kepada anak-anaknya.

4. Ada batasan dalam kesetaraan gender

Perempuan boleh memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam banyak hal, namun perempuan tetaplah perempuan, tidak boleh melampaui batasan yang telah di tetapkan oleh syari'at, contohnya dalam shalat berjamaah, perempuan tetap berada di shaf belakang laki-laki, tidak boleh di shaf yang sama atau di depan laki-laki, dan menjadi imam tetaplah peran laki-laki dalam shalat berjamaah. Kesetaraan gender memang di perbolehkan dalam islam selagi dalam batasan-batasan yang sesuai.



5. Allah memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama, Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Rabbnya, semuanya sama karena memang keduanya di ciptakan dengan kodratnya masing-masing, hanya saja keimanan dan ketaqwaan di antara mereka yang membedakan derajatnya di hadapan Rabbnya. Allah berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*³⁰

³⁰ Q.S An-Nahl : 97.

6. Perempuan berhak mendapatkan warisan

Dalam perkara warisan, perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, namun bagiannya hanya separuh dari bagian laki-laki. Hal tersebut dikarenakan perempuan juga mendapatkan mahar dan nafkah.

a. Perempuan berhak terbebas dari perbudakan

Manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan bebas atau merdeka, jadi sudah menjadi hak setiap orang baik itu laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan kebebasan dari hal perbudakan dan islam pun sudah melarang umatnya untuk menjadikan perempuan sebagai budak.

7. Kedudukan perempuan lebih mulia dan istimewa

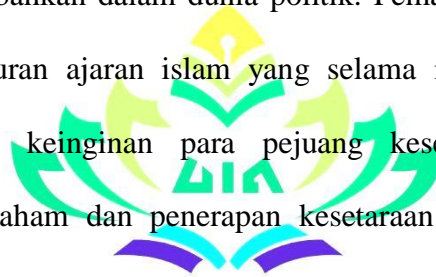
Dalam islam, kedudukan perempuan lebih mulia di bandingkan laki-laki. Hal tersebut pun di katakan dalam beberapa hadits.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : *“ada seseorang datang menemui Rasulullah S.A.W dan bertanya, ‘wahai Rasulullah, kepada siapakah aku selayaknya berbuat baik ?’ Beliau menjawab : ‘Kepada ibumu’ orang tadi bertanya kembali, ‘lalu kepada siapa lagi ?’ Rasulullah menjawab : ‘Ibumu.’ Kemudian ia mengulangi pertanyaannya, dan Rasulullah tetap menjawab ‘kepada ibumu’. Ia bertanya kembali, setelah itu kepada siapa lagi ? Beliau menjawab ‘kepada bapakmu!’.*

(H.R Bukhari Muslim)

Perjalanan sejarah peradaban islam yang sangat panjang melahirkan banyak pemikiran dan perbedaan pendapat dari kalangan ulama' maupun fuqaha, sehingga perlu adanya penyelarasan pemikiran dan pemahaman dalam memahami dan memaknai suatu permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil-dalil shahih yang merujuk pada Al-Quran dan Hadits.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu permasalahan yang sering di temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, pekerjaan bahkan dalam dunia politik. Pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan ajaran islam yang selama ini berkembang dalam masyarakat mendorong keinginan para pejuang kesetaraan gender untuk melakukan perbaikan paham dan penerapan kesetaraan gender di semua lini kehidupan.³¹



Maka lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang di sebut dengan *Mubadalah*. Konsep mubadalah di susun dari pecahan-pecahan pemahaman yang berserakan dan tidak tersusun secara benar sepanjang sejarah peradaban islam.

Konsep mubadalah sebenarnya sudah ada di dalam dua pedoman ajaran agama Islam yakni al-qur'an dan Hadits, namun dalam perjalanannya di masyarakat tidak selalu sejalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu di selaraskan dan di susun kembali secara utuh agar dapat memperbaiki dan mengubah pola

³¹ Ayub, Permasalahan Seputar Masyarakat, *Jurnal Budaya dan Sosial*, Vol 6 No. 3, 2018, h 35.

pemahaman yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

B. Konsep Mubadalah

Ada dua hal yang melatari persepektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural.

Pertama, faktor sosial. Dikalangan masyarakat, tidak bisa di pungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh yang dijelaskan dibagian pendahuluan. Tafsir semacam ini dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.

Kedua, faktor bahasa, sebagaimana diketahui, bahasa arab sebagai media yang digunakan al-qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dari

perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda (*ism*), kata kerja (*fi'l*), maupun kata ganti (*dhamir*). Baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mitsanna*), maupun plural (*jama'*). Baik bentuk kata untuk masa lalu (*madhi*), masa sekarang (*mudhari'*), atau masa yang akan datang (*mustaqbal*).

Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu jenis kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*).

C. Fungsi Mubadalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga, Sosial dan Politik

Kesetaraan gender yang diajarkan oleh syari'at semuanya bersumber dari al-qur'an dan hadits Nabi yang berlaku di semua ranah kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, pendidikan ataupun pekerjaan. Mubadalah merupakan teori atau cara penerapan yang digunakan untuk menjelaskan, memperbaiki serta meluruskan pemahaman yang salah dalam isu pengarusutamaan gender. Cara kerja metode mubadalah terhadap teks-teks sumber islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui.³²

Langkah pertama, yaitu menemukan serta mempertegas prinsip-prinsip ajaran agama islam dari teks-teks yang bersifat umum sebagai dasar pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang bersifat khusus untuk hal tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pemaknaan dalam seluruh rangkaian yang ada dalam metode mubadalah.

³² Ahmad Zuhri, *Kesetaraan dalam Agama Islam*, Cet II, (Surabaya, Rumah Cetak, 2017, h. 23.

Sesuatu di katakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi dasar setiap amal. Bahwa amal kebaikan akan di balas dengan pahala dan kebaikan yang lain tanpa melihat pada jenis kelamin, tentang keadilan yang harus di tegakkan, kemaslahatan dan kerahmatan yang harus di tebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas dan tawakal adalah baik dan di apresiasi oleh islam.

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama dalam teks-teks yang akan di tafsirkan. Dalam hal ini, teks-teks yang sifatnya terstruktur dan jelas yang di dalamnya sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan bersifat implementatif, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh tertentu bagi prinsip-prinsip islam. Langkah kedua ini secara sederhana bisa di lakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks, langkah ini bisa di lakukan dengan bantuan metode-metode yang ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum islam (*maqashid al-syari'ah*). Metode ini di gunakan untuk menemukan makna dalam sebuah teks lalu mengaitkannya dengan prinsip dari langkah pertama.

Makna yang lahir dari langkah kedua inilah yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat mubadalah., timbal balik, atau kesalingan. Jika teks tersebut sudah diperlakukan secara taghlib dan benar, dan mengandung mubadalah, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi jika belum

mengandung unsur mubadalah, terutama untuk teks-teks perempuan, maka di lakukan langkah ketiga.

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang di temukan dari teks yang lahir dari proses kedua kepada jenis kelamin yang tidak di sebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak di khususkan pada satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup semuanya (laki-laki dan perempuan). Sehingga metode mubadalah ini dapat menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan dan teks untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, selama kita sudah menemukan gagasan dan maksud utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk semuanya.

1. Mubadalah dalam Rumah Tangga



Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang di anjurkan kepada umatnya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam al-quran banyak ayat menjelaskan tentang anjuran untuk menikah, salah satunya surat adz-dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*³³

Membina mahligai rumah tangga merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada tuhan dan rasulnya, melalui rumah tangga di harapkan akan terbentuk komunitas kecil yang berlandaskan nilai-nilai agama islam. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat,

³³ Q.S Adz-Dzariyat : 49

apabila setiap keluarga di didik dengan baik sesuai dengan ajaran agama, maka nantinya akan terbentuk karakter masyarakat yang islami pula.³⁴

Seseorang yang sudah menikah wajib menghormati dan menghargai pasangannya demi terciptanya keharmonisan hubungan rumah tangga di dalamnya, serta mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih berat terhadap keluarganya, baik itu suami maupun istri. Karena keduanya harus berjalan seimbang, berperan sesuai dengan tugas masing-masing dalam keluarga.

Dalam Islam salah satu tujuan menikah adalah untuk mencari ketentraman dan kebahagiaan batin dengan orang yang di kasihi. Allah berfirman :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³⁵

Ayat di atas memang di tujukan untuk kaum laki-laki (suami), wanita di ciptakan dari tulang rusuk adam, sehingga tatkala keduanya (laki-laki dan perempuan) di satukan dalam sebuah pernikahan, maka keduanya bersatu kembali.

³⁴ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta, Penamadani, 2004), h. 61.

³⁵ Q.S Ar-Rum : 21.

Suami yang merupakan kepala rumah tangga dalam keluarga harus bisa bersikap baik, lemah lembut dan adil terhadap istri dan anak-anaknya, serta membimbing dan mengarahkan semua anggota keluarganya ke dalam kebaikan dan nilai-nilai agama, Allah berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٣٦}

*Dan bergaullah dengan mereka (wanita) secara patut.*³⁶

Namun dalam kehidupan rumah tangga, tidak sedikit seorang suami yang melakukan tindak kekerasan ataupun pelecehan terhadap istri atau anak perempuan mereka dengan berbagai faktor alasan, hal ini yang menyebabkan trauma terhadap istri akibat sikap dan tindakan kasar yang dilakukan suami terhadapnya. Padahal niat, tujuan pernikahan sudah di kokohkan di awal, agar relasi pasangan suami istri mempunyai dasar yang kuat sehingga dapat bertahan lebih kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang di hadapkan di kemudian hari.

Walau bagaimanapun, pasti akan ada permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang baik bukan berarti tidak mendapatkan ujian atau masalah dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tetapi yang mampu dan sanggup untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan prinsip kesalingan.³⁷ Setidaknya ada empat problem relasi pasangan suami istri yang sering di temukan dalam kehidupan rumah tangga.

³⁶ Q.S An-Nisa' : 19

³⁷ Fakihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), h.409.

Nusyuz³⁸ atau lebih di kenal dengan pembangkangan istri kepada suami. Sesuatu yang mengesankan searah, dalam hal ini hanya istri yang di anggap membangkang, tidak ada pembangkangan suami. Padahal pada kenyataannya, pembangkangan bisa terjadi dari kedua arah (suami dan istri).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pasal mengenai nusyuz istri, namun tidak sebaliknya, yaitu terdapat pada pasal 84 ayat 1-4, dalam pasal ini di katakan bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami tanpa adanya sebuah alasan, maka di anggap nusyuz. Pembahasan tentang nusyuz dalam Al-Quran di jelaskan dari dua arah, ada nusyuz istri kepada suami dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan nusyuz suami kepada istri dalam surat An-Nisa' ayat 128.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan

³⁸ Nusyûz berarti penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak, akan tetapi Nusyûz dapat juga terjadi pada suami apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya.

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar³⁹.

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Ayat ini berlaku untuk suami dan istri, sehingga ayat tersebut seharusnya bisa di jadikan sebagai prinsip dalam memahami ayat lain mengenai nusyuz istri terhadap suami. Sehingga ketika istri nusyuz kepada suami, maka tidak serta-merta seorang suami bisa melakukan kekerasan seperti memukul istrinya, karena inti dari nusyuz adalah bagaimana mengembalikan relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi antara suami dan istri. Karena melakukan kekerasan seperti memukul kepada istri bukan ajaran agama dan jauh dari substansi Al-quran.

Islam adalah penyerahan diri (kepada Allah Swt), kedamaian, dan kesejahteraan. Dengan makna ini, fungsi keluarga dalam Islam adalah

³⁹ Q.S An-Nisa' : 34

⁴⁰ Q.S An-Nisa' : 128.

untuk membentuk pribadi yang berserah diri kepada Allah Swt, dan yang meyakini serta mengamalkan nilai-nilai kedamaian dan kesejahteraan, baik sesama anggota keluarga maupun masyarakat luas.

Sebagaimana ditegaskan para ulama salaf, hukum-hukum yang disyariatkan Islam tidak lepas dari tujuan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Termasuk hukum keluarga Islam. Atau yang biasa dikenal dengan *al-Ahwal asy-Syakhsyah al-Islamiyah*.

Ada tiga landasan filosofis untuk memperkokoh fungsi kemaslahatan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Pertama, tauhid dan kehambaan manusia yang melahirkan relasi kesalingan antara anggota keluarga. Kedua, kekhalifahan manusia di muka bumi (*khilafah fil ardh*) yang melahirkan semangat kerjasama, di dalam dan di luar keluarga. Ketiga, *sakinah, mawaddah, rahmah*, yang melahirkan komitmen bersama untuk selalu menghadirkan segala kebaikan (*jalbul mashalih*) dan menghindarkan segala keburukan (*dar'ul mafasid*), bagi keluarga maupun masyarakat luas.

1. Tauhid dan Relasi Kesalingan

Ajaran paling fundamental dalam Islam adalah tauhid. Ajaran ini terekam dan sebuah kalimat "*lā ilāha illallāh*". Artinya, tiada tuhan selain Allah Swt. Kalimat ini adalah bentuk proklamasi dari setiap muslim tentang keesaan Allah Swt. Sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah, ditaati, dan dirujuk secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal. Pertama, pengakuan akan keesaan

dan ke-hanya-an Allah Swt sebagai Tuhan. Kedua, pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Laki-laki maupun perempuan.

Tiada tuhan selain Allah Swt berarti tidak boleh ada yang disembah selain-Nya. Tidak boleh ada perantara antara hamba dengan Tuhannya. Jadi, sesama manusia tidak boleh ada yang menjadi “tuhan” terhadap yang lain. Dalam kehidupan sosial, konsekuensinya, raja bukan tuhan bagi rakyatnya. Majikan bukan tuhan bagi buruhnya. Pun dalam keluarga, tidak boleh ada salah satu yang merasa paling penting laksana tuhan bagi yang lain. Suami bukan tuhan bagi istri. Orang tua juga bukan tuhan bagi anak-anaknya. Begitupun sebaliknya.

Karena relasi vertikal manusia dalam perspektif tauhid hanya kepada Allah Swt, maka relasi antara suami-istri dan orang tua-anak tidak boleh dibangun atas dasar dominasi dan hegemoni. Relasi dominasi dan hegemoni biasanya melahirkan penguasaan, kekerasan dan kezaliman, yang semuanya diharamkan Islam. Sebaliknya, relasi kemanusiaan dalam keluarga yang harus dibangun, dengan perspektif tauhid, adalah relasi horizontal yang mengacu pada nilai-nilai kesetaraan, kesalingan dan kerjasama.

Karena itu, menikah dalam perspektif tauhid Islam adalah bukan proses penghambaan seorang perempuan kepada laki-laki. Tetapi proses mengikatkan diri pada perjanjian kemitraan (*zawaj*) antara mereka. Dengan menikah dan berkeluarga, masing-masing tetap hanya menghambakan kepada Allah Swt semata. Tidak boleh ada yang menghambakan

atau menjadi hamba pada yang lain. Sehingga relasi satu sama lain yang harus dibangun adalah kesalingan untuk kebahagiaan (*sakinah*), kebaikan (*sholaah*) dan kesejahteraan (*falaah*). Yaitu relasi yang menumbuhkan agar masing-masing saling mencintai (*tahaabub*), saling tolong menolong (*ta'aawun*) dan saling melayani (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Antara suami dan istri. Serta antara orang tua dan anak. Hukum Keluarga Islam, dengan demikian, harus menerjemahkan perspektif ketauhidan yang mengantar pada relasi kesalingan antara suami dan istri, juga orang tua dan anak.

2. Khilafah dan Kerjasama

Konsep kunci yang lain dalam Islam adalah bahwa manusia diciptakan Allah Swt di muka bumi sebagai khalifah yang memegang amanah untuk memakmurkan bumi tersebut, melestarkan kebaikan dan menjauhkan segala kerusakan darinya. Amanah khilafah ini dipegang oleh manusia laki-laki dan perempuan. Dan untuk melaksanakan amanah ini, kedua belah pihak, harus kerjasama dan saling tolong menolong. Dalam konsep al-Qur'an, laki-laki dan perempuan, satu sama lain adalah *auliyaa'* (penolong satu sama lain) dalam segala aktivitas ritual dan sosial.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang

*lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴¹

Ayat ini menegaskan relasi kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dimana yang satu adalah penolong, penopang, penyangga, dan pendukung yang lain. Frasa “*ba‘duhum awliyā’ ba‘dīn*” adalah pernyataan eksplisit al-Qur’an mengenai pentingnya kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Keluarga menjadi sekolah pertama bagaimana pribadi-pribadi yang mengemban kekhalifahan dari Allah Swt dapat menumbuhkan kesalingan dan kerjasama. Sehingga amanah kekhalifahan tersebut dapat direalisasikan di dalam keluarga terlebih dahulu, sebelum kehidupan sosial yang lebih luas.

Menikah dan berkeluarga, dengan demikian, bukan untuk memperkecil apalagi mematikan potensi seseorang sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi. Tetapi justru untuk mempersiapkan, melatih, dan saling mendukung potensi tersebut sejak di dalam rumah. Untuk dikembangkan lebih lanjut, agar setiap anggota keluarga bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan, untuk dirinya, keluarga kecilnya, keluarga yang lebih besar dan masyarakat yang lebih luas. Hukum Keluarga Islam, karena itu, harus menyerap semangat ajaran khilafah kemanusiaan yang

⁴¹ Q.S At-Taubah : 71

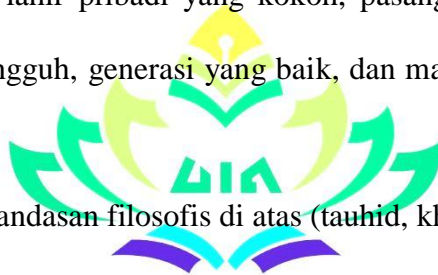
mendorong implementasi ajaran kerjasama antara suami dan istri, serta orang tua dan anak.

3. **Pilar *Sakinah, Mawaddah, Rahmah***

Tiga kata ini, yang biasa disingkat sa-ma-ra sudah begitu populer di kalangan masyarakat. Diambil dari ayat Surat Ar-Rum (30: 21), ia menjadi pilar, tujuan, dan harapan setiap orang yang menikah dan memasuki jenjang keluarga. *Sakinah* diartikan sebagai ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan. *Mawaddah* adalah rasa cinta yang membuat seseorang menikmati ketika dilayani pasangannya. Sementara *rahmah* adalah rasa cinta yang justru menikmati ketika melayani pasangannya. Singkatnya, harapan kebahagiaan (*sakinah*) itu akan terwujud ketika masing-masing merasa senang dengan mencintai dan melayani (*rahmah*), pada saat yang sama juga senang karena dicintai dan dilayani (*mawaddah*).

Untuk memuluskan harapan samara ini, al-qur'an telah menetapkan empat pilar pernikahan dan berkeluarga, bahwa pernikahan harus dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dipelihara bersama, bahwa pernikahan adalah ikatan berpasangan (*zawaj*), dimana suami adalah pakaian bagi istri dan istri juga pakaian bagi suami, segala perilaku dalam berkeluarga harus didasarkan pada kesalingan untuk kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan pengelolaannya juga didasarkan pada kemauan bersama (*taradhin*) dan rembug bersama musyawarah.

Dengan empat pilar ini, relasi kesalingan akan mudah ditumbuhkan, prinsip kerjasama akan mudah dilaksanakan, harapan kebahagiaan dan cinta kasih juga akan mudah dipenuhi dalam sebuah keluarga Islam. Melalui empat pilar ini, masing-masing anggota keluarga dituntut untuk mengokohkan pondasi keluarga, menghadirkan segala kebaikan, dan menghalau segala keburukan (*jalbul-mashalih wa dar'ul-mafasid*). Baik suami maupun istri, orang tua maupun anak, saudara maupun pekerja rumah tangga. Dari suasana keluarga seperti ini diharapkan akan lahir pribadi yang kokoh, pasangan yang salih/salihah, keluarga yang tangguh, generasi yang baik, dan masyarakat yang adil dan sejahtera.



Dengan ketiga landasan filosofis di atas (tauhid, khilafah, dan sa-ma-ra), hukum keluarga Islam diformulasikan dalam konteks masyarakat yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan mazhab hukum fiqh, sepanjang sejarah Islam, seluas daerah-daerah dan negara-negara Islam, harus didudukkan dan diinterpretasikan dalam tatanan tiga landangan filosofis ini yang mengacu pada keberserahan hanya kepada Allah Swt, kedamaian, kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan. Jika pada praktiknya, ada aturan hukum keluarga yang keluar atau menyalahi landasan filosofis ini, semestinya bisa diformulasikan ulang sehingga benar-benar dapat menghadirkan ajaran kesalingan, prinsip kerjasama, dan tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang digagas Islam.

2. Mubadalah dalam Kehidupan Sosial

Dalam pembicaraan tentang sejarah perempuan dari masa pra Islam sampai masa kedatangan Islam, tentu akan melewati sebuah fase sejarah yang oleh kalangan intelektual muslim disebut dengan istilah masa *jahiliyah*.⁴² Pada masa itu, perempuan tidak memiliki nilai dan martabat, bahkan mereka (orang jahiliyah) tidak segan untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang lahir, karena mereka menganggapnya sebagai aib.⁴³ Hampir semua kegiatan dalam kehidupan sosial melibatkan kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan bukan makhluk yang bisa di kesampingkan keberadaannya di dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat dari pada laki-laki. Keberadaan mereka sebagai aset bangsa yang potensial (*agent of development*) membuat mereka sangat di butuhkan dalam proses pembangunan di skala kecil seperti keluarga dan masyarakat.

Tetapi pandangan miring terhadap perempuan nyatanya masih ada dan bahkan sudah menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam sebagian besar pola pikir masyarakat awam, seperti anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya hanya akan menjadi pengurus rumah tangga, kemudian anggapan bahwa perempuan lebih baik bekerja membantu ekonomi keluarga dari pada sekolah dan lain sebagainya.

⁴² Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith*, istilah jahiliyah di artikan ke dalam dua pengertian, pertama, kondisi kebodohan dan kesesatan bangsa arab sebelum kedatangan Islam (*ma kana 'alaihi al-'arab qabl al-islam min al-jahalah wa al-dhalalah*), kedua, masa kekosongan di antara dua rosul (*zamanul fathrah baina rasulaini*).

⁴³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, Cet I, (Bandung, Mizan, 2001), H. 27.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan terhadap kesetaraan gender belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna di kalangan masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut mungkin lebih banyak terjadi di pedesaan atau lingkungan yang masyarakatnya belum sepenuhnya tahu tentang perlunya relasi gender dalam kehidupan sosial.

Perlakuan tersebut terjadi karena budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dari masa ke masa, sehingga menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Warisan yang bersifat diskriminatif tersebut akan terus berkembang hingga zaman modern selalipun.⁴⁴

Salah satu penyebab terjadinya diskriminasi yaitu karena merasa lebih kuat dari korbannya dan di rasa lebih memberikan pengaruh lebih baik dari pada. Dalam lingkungan masyarakat, laki-laki di anggap lebih mampu dan bisa dalam segala hal dan aspek kehidupan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “setiap orang di lahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.⁴⁵

Banyak masyarakat kurang bisa membedakan hal-hal yang sifatnya kodrati dan hal-hal yang bersifat peran semata. Kodrati maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa di rubah atau di tukar sejak manusia itu lahir, seperti melahirkan, menyusui. Sedangkan yang sifatnya hanya peran adalah hal-hal

⁴⁴ Zidan Baihaqi, *Pengaruh Budaya dan Sosial dalam Kehidupan*, Cet I, (Malang, Citra Laksana, 2015), h. 57.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (1).

yang dapat di kerjakan oleh siapapun baik laki-laki ataupun perempuan, seperti seorang suami yang mencuci pakaian, mencuci piring dan menyapu ketika istrinya sedang sakit.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, isu gender tidak hanya ramai di perbincangkan dalam event-event penting, bahkan sudah menjadi sebuah gerakan yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan gender. Perdebatan mengenai konsep gender masih berlangsung, apakah perbedaan gender itu di sebabkan faktor alami atau sosialisasi.

Dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat yang saling bertentangan terkait pembentukan sikap maskulin atau feminim pada laki-laki dan perempuan. *Pertama*, perbedaan sikap maskulin atau feminim pada laki-laki dan perempuan tidak dapat terlepas dari pengaruh biologis (seks).

Kedua, pembentukan sifat maskulin dan feminim pada laki-laki dan perempuan bukan karena perbedaan biologisnya, tetapi karena adanya pengaruh kultur dan sosial, maksudnya sifat maskulin dan feminim pada seseorang bisa terbentuk melalui proses sosialisasi.⁴⁶ Banyak para aktivis perempuan di berbagai negara yang turut menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam segala aspek, seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan politik.

⁴⁶ Shonhaji, *Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Sosial Pada Masyarakat Multietnik Di Lampung*, Jurnal Tapis, Vol. 14 No. 01, 2017, h. 20.

Salah satu contoh yang terjadi beberapa waktu lalu di negara Pakistan adalah seorang perempuan bernama Malala Yousafzai⁴⁷, ia meminta hak anak-anak perempuan yang ada di kota asalnya Swat Valley untuk bisa mendapatkan pendidikan, yang pada saat itu kelompok mereka (Taliban) melarang para perempuan untuk bersekolah dan mengikuti kegiatan budaya yang ada di sana dan mencoba untuk menguasai daerah tersebut dengan menjadikan Swat Valley lebih dominan dalam bidang sosial dan politik.

Dengan tekadnya yang gigih dan berani, Malala berhasil memperjuangkan hak anak-anak perempuan di sana, ia mendirikan lembaga amal Malala Fund yang bertujuan memberdayakan anak perempuan untuk mengolah potensi mereka, kemudian ia juga mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian atas perannya dalam memperjuangkan hak anak serta menjadi orang termuda yang mendapatkan penghargaan di usianya yang masih tujuh belas tahun pada tahun 2014.


Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria tanpa adanya diskriminasi. Marry Wallstonecraft dalam bukunya "*The Right of Woman*" pada tahun 1792 mengartikan Feminisme merupakan suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang

⁴⁷ Malala Yousafzai adalah seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dari kota Mingora di Distrik Swat dari provinsi Pakistan Khyber Pakhtunkhwa. Dia diketahui untuk pendidikan dan aktivisme hak-hak perempuan di Lembah Swat, di mana Taliban telah dilarang pada waktu gadis bersekolah.

menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita.

Inti dari Feminisme adalah bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan diri. Hal ini bisa diartikan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Berikut adalah beberapa alasan yang akan membuatmu sadar betapa pentingnya Feminisme.⁴⁸

Feminisme juga sebuah paham yang ingin menghormati perempuan, sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dalam kehidupan sosial serta tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka. Beberapa dampak positif dari gerakan feminisme di antaranya.

- 
1. menaikkan derajat kaum perempuan
 2. kaum perempuan berhak berperan dalam pembangunan nasional suatu negara
 3. kaum perempuan berhak meningkatkan kedudukan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, maka sudah selayaknya seorang perempuan mendapatkan kesetaraan dan keadilan yang sama dengan laki-laki. Nash Al-quran dan hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan persamaan hak sesempurna-sempurnanya.

⁴⁸ “Ini 8 (Dari Sekian Banyak) Alasan Kenapa Feminisme Begitu Penting”, (On-line), tersedia di: <https://www.idntimes.com/life/women/ingriani-wionika/ini-alasan-kenapa-feminisme-begitu-penting-c1c2/full>, (5 Desember 2019).

Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, Allah juga menetapkan hak antara manusia seluruhnya, di dalam surah-surah makiyyah dan madaniyah, dan adil dalam bahasa artinya penyamarataan.⁴⁹ Hak pertama yang di perhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh di hancurkan kemuliaannya, manusia adalah ciptaan Allah.⁵⁰

صَنَّ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠٠﴾

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵¹

Dalam teologi Islam di tegaskan, bahwa manusia di ciptakan oleh Allah Maha pencipta sebagai jenis makhluk yang di muliakan, dan harus di hormati sebagai manusia apapun warna kulitnya, dari manapun asalnya, apapun agama yang di yakini.⁵² karena salah satu tujuan di ciptakannya manusia adalah sebagai khalifah Allah dan sebagai ‘abdullah (hamba Allah).⁵³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَخُنْ نُّسْبَیْهُ ۚ قَالُوْۤا سُبْحٰنَکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ۚ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

⁴⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta, Amzah, 2005), H. 221.

⁵⁰ Ahmadal-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet III, (Jakarta, AMZAH, 2013), h. 22.

⁵¹ Q.S An-Naml : 88.

⁵² Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cet III, Tanjung Barat-Jakarta Selatan, Lantabora Press, 2005), h. 288.

⁵³ Haidarputra Daulay Pendidikan Islam dalam Perspektif Fisafat, Cet I, (Jakarta, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h. 47.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁵⁴

Dengan ikut berperan dalam pembangunan nasional negara tanpa adanya perbedaan di antara keduanya, maka keseimbangan kehidupan pun akan terwujud. Tetapi perempuan juga harus mengetahui sampai mana mereka dapat di setarakan dengan laki-laki, karena pada hal-hal atau posisi tertentu, perempuan tidak bisa menduduki posisi tersebut.

3. Mubadalah dalam Dunia Politik

Wanita juga makhluk sosial, sama halnya dengan laki-laki yang mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah, menegakkan agama-Nya serta menjauhi segala sesuatu yang di larang oleh Allah. Segala sesuatu yang di tetapkan Allah dalam syari'at-Nya pasti di dalamnya meliputi diri seorang wanita, kecuali ada alasan atau dalil tertentu untuk kaum laki-laki.

Jika Allah berfirman “Wahai Manusia” atau “Wahai Orang-Orang Mukmin”, maka tidak ada perbedaan dalam firman tersebut antara laki-laki maupun perempuan, karena tidak menunjukkan sikap atau makna khusus yang di tujukan kepada satu golongan laki-laki ataupun perempuan.

Secara umum, dasar hukumnya wanita sama seperti laki-laki dalam hal pelaksanaan pembebanan, kecuali ada pengecualian. Al-Qur'an membebankan pada dua jenis, laki-laki dan wanita mempunyai tanggung

⁵⁴ Q.S Al-Baqarah : 30

jawab menegakkan kebenaran dalam masyarakat dan membenahinya atau dalam islam di kenal dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Allah berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁵⁵

Dari dasar-dasar tersebut, maka kita perlu melihat topik masuknya perempuan ke dalam Dewan Perwakilan dan penetapan pencalonannya serta kelayakannya untuk ikut serta berperan di dalamnya yang di dasarkan pada dalil-dalil syar'i.

Ada yang berpendapat bahwa keikutsertaan perempuan dalam ranah politik itu haram. Tetapi pernyataan haram itu nyatanya tidak disertai dengan dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut, sementara hukum dasar segala sesuatu dan urusan duniawi adalah mubah, kecuali jika ada dalil khusus yang mengharamkannya.⁵⁶

Ada dalil yang di gunakan untuk mengharamkan hal tersebut.

Allah berfirman :

⁵⁵ Q.S At-Taubah 71

⁵⁶ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), h.230.

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.*⁵⁷

Maksud dari ayat di atas adalah seorang perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak dan sangat penting. Namun ayat ini tidak bisa di jadikan dalil karena ada beberapa pertimbangan.

1. Ayat ini di tujukan kepada istri nabi ﷺ, seperti yang di ketahui bahwa istri nabi mempunyai kehormatan dan perlu penekanan tersendiri dari pada perempuan lain. Oleh karena itu pahala mereka akan berlipat ganda apabila mengerjakan amal shalih dan sebaliknya adzab mereka juga berlipat apabila mereka mengerjakan perbuatan yang buruk
2. Meskipun telah turun ayat tersebut, Aisyah tetap keluar dari rumah dan ikut berperang sebagai reaksinya memenuhi kewajiban agama, menuntut balas atas terbunuhnya Utsman. Tapi ketetapan takdir menempatkannya di tempat yang salah atas perbuatannya itu.
3. Bagaimanapun juga, wanita harus keluar rumah dengan alasan tertentu dan tidak melanggar syari'at yang ada, seperti ke sekolah, ke perguruan tinggi, ikut andil dalam kegiatan sosial seperti menjadi guru, dokter dan lain-lain. Yang mana hal tersebut tidak bisa di lakukan tanpa keluar rumah.

⁵⁷ Q.S Al-Ahzab : 33

4. Menahan wanita di dalam rumah tidak di kenal, kecuali dalam jangka waktu tertentu, sebagai hukuman atas kekejian yang di lakukannya dan sebelum ada ketetapan hukum untuknya, sebagaimana firman Allah :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلٌ ﴿٥٨﴾

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁵⁸

Ada pula yang melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sikap preventif. Apabila seorang wanita di calonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, maka ia di tuntutan untuk berbaaur dengan laki-laki atau bahkan berkhawat dengan seorang laki-laki, tentu saja hal ini haram dan melanggar syari'at islam, sebab sesuatu yang menjurus pada perbuatan haram dan di larang, maka hukumnya juga haram.

Apabila seorang perempuan di calonkan atau di pilih dalam dewan perwakilan, ia harus pandai menjaga perilakunya saat berhadapan dengan laki-laki dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan hukum syar'i.

⁵⁸ Q.S An-Nisa' 15

Mereka yang melarang perempuan untuk duduk di dewan perwakilan, beranggapan bahwa kedudukan atau posisi dalam dewan perwakilan itu di peruntukkan untuk kaum laki-laki, sebab yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁵⁹

Ada dua alasan mengapa ayat di atas tidak bisa sepenuhnya di jadikan alasan atas keterlibatan perempuan dalam dewan perwakilan.

1. Perempuan yang di pilih dalam dewan perwakilan rakyat baik dari tingkat pusat sampai daerah jumlahnya sangat terbatas, hal itu di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga mayoritas anggota dewan adalah laki-laki. Jumlah mayoritas inilah yang mempunyai hak untuk membuat ketetapan, dan juga memecahkan permasalahan. Sehingga tidak bisa di katakan bahwa

⁵⁹ Q.S An-Nisa' 34.

perempuan yang menjadi anggota dewan perwakilan akan mengangkat perempuan sebagai pemimpin atas kaum laki-laki.

2. Dalam surat An-Nisa' ayat 34 kepemimpinan laki-laki yang dimaksud yaitu dalam konteks rumah tangga, seorang laki-laki (suami) mempunyai tanggung jawab atas istri, anak dan keluarganya, karena kodratnya seorang laki-laki harus bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya, baik secara lahiriyah atau batiniyah.

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu ini merupakan kado tahun baru bagi kalangan aktivis perempuan yang sudah berjuang cukup lama untuk UU Partai politik dan UU Pemilu yang lebih ramah perempuan. Tapi, perjuangan memang belum berakhir, dan kalangan aktivis perempuan kembali berkepentingan untuk mewarnainya agar sistem pemilu yang nanti digunakan juga ramah terhadap keterwakilan perempuan.

Tulisan Ani Soetjipto (Media Indonesia, 11/2/08) mempromosikan sistem zipper(zebra) sebagai bentuk tindakan afirmatif (affirmative action) atau kuota terhadap perempuan dalam pencalonan mereka sebagai kandidat yang diusung partai politik.

Zipper sistem adalah sistem penentuan legislatif secara selang-seling. Penentuan seperti *retsleting* secara selang-seling dianggap dapat mewujudkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Indonesia tidak menganut sistem zipper murni. Menurut Ferry Mursyidan Baldan

sistem zipper yang diterapkan di Indonesia adalah sistem zipper yang telah dimodifikasi.⁶⁰

Sistem zipper murni mengatur bahwa antara pria dan wanita ditempatkan secara berselingan, zipper system juga yang mengatur adanya minimal 30% perempuan di parlemen. Jadi, jika sebuah partai mendapat 3 kursi, maka salah satunya harus diberikan kepada caleg perempuan yang mendapatkan suara terbanyak. KPU harus melaksanakan zipper system tersebut berdasarkan pasal 53 UU No 10/2008 yang mengatur 30% kuota perempuan di parlemen.

Mengenai sistem keterwakilan perempuan menurut UU No 10 Tahun 2008, dapat dilihat pada pasal 53 sampai dengan pasal 58 UU No 10 Tahun 2008. Pasal 52 mengatur penyusunan bakal calon legislatif (caleg). Pasal 52 ini menentukan bahwa bakal caleg disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing (ayat1).

Selanjutnya ditentukan secara tegas bahwa di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Pembicaraan tentang sistem zipper ini belum banyak dibicarakan di Indonesia. Secara sederhana, pengertian dari sistem zipper, yang merupakan salah satu variasi dari kuota, adalah mendaftarkan kandidat

⁶⁰“Zipper System”, (On-line), tersedia di: <http://fatahilla.blogspot.com/2009/02/zipper-sistem-dan-eksistensi-peran.html>, 5 Desember 2019.

perempuan dan laki-laki secara selang-seling dalam daftar pencalonan yang diajukan partai (party list).⁶¹

Soal selang-selingnya antara laki-laki dan perempuan tinggal berdasarkan kesepakatan saja, apakah 1:1 atau 1:2 atau 1:3. Tujuannya untuk membantu memastikan perempuan tidak dicalonkan dalam urutan sepatu, dan sebaliknya, memberikan kemungkinan perempuan bisa terpilih dalam pemilu legislatif.

Jika kita melihat peningkatan presentasi perempuan melalui pengalaman negara-negara lain yang sudah menjalankannya sistem zipper maka akan memungkinkan keterwakilan perempuan di Indonesia meningkat. Menurut *Women's Environment and Development Organization*, sebuah organisasi internasional yang memonitor keterwakilan perempuan di parlemen di seluruh dunia, ada sekitar 13 negara yang menggunakan sistem elektoral representasi proporsional (sistem daftar) dengan sistem kuota zipper. Dan ternyata, dalam waktu yang relatif singkat, negara-negara tersebut berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melampaui angka critical mass (30%).

Menariknya, negara-negara tersebut tidak hanya mewakili negara-negara maju yang sudah mapan sistem politiknya (seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark), tapi juga negara-negara berkembang

⁶¹ "Meninjau Ulang System Zipper", (On-line), tersedia di: <http://ranilukita.wordpress.com/2009/02/03/menin-jau-ulang-zipper-system>, 5 Desember 2019.

yang masih bermasalah dengan kehidupan politik dan ekonominya (seperti Rwanda, Argentina, Mozambik, dan Afrika Selatan).⁶²



⁶² “Zipper System”, (On-line), tersedia di: <http://www.prakarsa-rakyat.org/>, 5 Desember 2019.

BAB III

PENGARUSUTAMAAN GENDER MENURUT INPRES NO.9 TAHUN 2000

A. Latar Belakang Lahirnya Inpres No.9 Tahun 2000

Perjuangan yang dilakukan dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan cikal bakal lahirnya sebuah peraturan yang berlaku dinegara Indonesia, yakni Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sapaan Gusdur, merupakan orang yang berperan dan berpengaruh penting dalam lahirnya Instruksi Presiden tersebut.

Gusdur adalah sosok yang banyak dikagumi oleh banyak orang terutama perempuan karena pemikiran dan eksistensinya dalam menegakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pemikirannya banyak di tuangkan dalam karya-karyanya, salah satu nya dalam buku “ISLAMKU ISLAM ANDA ISLAM KITA”.

Pemikirannya terhadap perempuan juga dicantumkan didalam buku tersebut, menurutnya perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional atau kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur klasik. Akibatnya masyarakat pun menjadi terpengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.⁶³

Siti Mahmudah, berpendapat bahwa,

⁶³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta, The Wahid Institution, 2006), Cet I, h. 129.

“Gus Dur tokoh penting dalam kesetaraan gender. Gus Dur mewarisi sifat ayahnya, K.H. Wahid Hasyim yang menjadi Menteri Agama RI merupakan pelopor sekolah hakim perempuan pertama pada tahun 1950 an. Pada saat Gus Dur menduduki jabatan sebagai Presiden RI, beliau telah mengubah Menteri Urusan Peranan Wanita, menjadi Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan. Gus Dur mempelopori terbitnya Inpres No.9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi inilah yang menjadi embrio dari berbagai kebijakan yang ramah perempuan, di antaranya tindakan afirmasi kuota 30% perempuan di ranah politik. Pada perkembangannya Inpres ini di tingkatkan menjadi UU Keadilan dan kesetaraan Gender. Gus Dur ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa negara juga mesti menempatkan perempuan setara dalam pembangunan. Konstalasi pemikiran feminis Gus Dur berlandaskan dua sumber, yakni Pancasila dan Teologis.”⁶⁴

Pemikiran, pandangan, dan perilakunya, menjadi teladan masyarakat luas.

Termasuk dalam isu perempuan, Gus Dur berani mendobrak paradigma yang jelas-jelas salah, bahkan ketika para kiai atau intelektual kenamaan sekalipun, belum tentu berani mendobrak paradigma dimasyarakat yang telah mapan.⁶⁵ Terkait isu perempuan, Gus Dur berani mengatakan, bahwa poligami itu tidak boleh. Ketegasan sikap Gus Dur itu, dengan pertimbangan betapa berat syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh mereka yang menghendaki berpoligami. Gus Dur, melalui istrinya, Sinta Nuriyah, menjelaskan orang yang mengatakan bahwa poligami itu boleh, hanya menafsirkan ayat secara sepenggal-sepenggal tanpa mendalami syaratnya yang begitu berat. Utamanya soal keadilan.

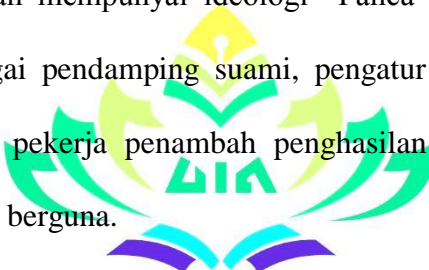
Berbicara tentang pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming, awal mulanya di mulai pada tahun 2000. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di

⁶⁴ “Kenapa gus dur banyak di kagumi perempuan?”, (On-line), tersedia di: <https://www.nu.or.id/post/read/100446/kenapa-gus-dur-banyak-dikagumi-perempuan>, (04 Desember 2019).

⁶⁵ Arofatul Ulya, “Gus Dur dan Keberpihakan Pada Perempuan”, (On-line), tersedia di: <https://www.dutaislam.com/2017/12/gus-dur-dan-keberpihakan-pada-kaum-perempuan.html>, (4 Desember 2019).

keluarkan pada masa Kepresidenan Gus Dur. Namun jauh sebelum Inpres No.9 Tahun 2000 itu muncul, pembahasan tentang kesetaraan gender sudah ada dan turut di perjuangkan oleh beberapa tokoh pahlawan wanita Indonesia, seperti contohnya RA. Kartini, HR. Rasuna Said, dan Dewi Sartika.

Perjuangan dalam menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender terus di lakukan sampai memasuki era orde baru. Pada tahun 1978 di bentuk kementerian urusan peranan wanita dalam kabinet, dan diselipkan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang sudah ada sejak 1957 di bawah naungan menteri dalam negeri dan mempunyai ideologi “Panca Dharma Wanita” yang berarti perempuan sebagai pendamping suami, pengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang berguna.



Sekitar tahun 1970-1980, benih-benih gerakan perempuan kontemporer mulai muncul dikalangan kaum intelektual yang di kenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO). Kalangan ini mulai menjalin kontak dan meulai memperluas ruang lingkup mereka hingga ke tingkat Internasional. Namun, meskipun sudah banyak upaya dan perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan gender, kondisi kesenjangan gender masih banyak di jumpai, sehingga perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan gender di era orde baru agak tenggelam.⁶⁶

Kemudian pada periode kepemimpinan presiden BJ Habibie, di bentuk Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan yang di kenal

⁶⁶ Ahmad Aldani, Revolusi Gender dalam Masyarakat, *Jurnal AUM*, Vol 2 No.5, 2017, h. 33.

dengan Komnas Perempuan pada tahun 1999 melalui Instruksi Presiden. Inpres tersebut merupakan jawaban atas tuntutan dari beberapa tokoh perempuan kepada presiden Habibie pada saat itu. Dalam perjalanannya sampai sekarang, lembaga tersebut banyak berperan sebagai lembaga aktif memasyarakatkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, di keluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan mulai gencar melakukan kampanye isu kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Sejarah perjuangan kesetaraan gender tidak berhenti sampai di situ saja, pada masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri, kementrian negara pemberdayaan perempuan melanjutkan Inpres No.9 Tahun 2000 dengan fokus perhatian utamanya pada partisipasi perempuan dalam kehidupan dan jabatan politik. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan kuota kursi legislatif sebanyak 30 persen untuk caleg perempuan, dan di setuju dalam Undang-Undang Pemilu yang baru pada Pasal 65. Kemudian pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla mengangkat empat orang perempuan dalam kabinetnya.⁶⁷

Jadi, kesetaraan dan keadilan gender tidak muncul begitu saja, melainkan sudah di perjuangkan dari zaman kolonial oleh para pahlawan-pahlawan nasional perempuan Indonesia, sehingga sampai sekarang antara kaum laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, namun

⁶⁷ Dian Andini, Sejarah Perjuangan Gender Dari Masa Kemasa, *Jurnal Sejarah*, Vol 4 No. 5, 2018, h. 55.

semua itu tidak terlepas dari konteks cara pandang yang harus di sesuaikan dengan kodrat perempuan, yang di maksud adalah harus tetap memperhatikan kodrat perempuan.

B. Konsep dan Tujuan Pengarusutamaan Gender Menurut Inpres No.9 Tahun 2000

Penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.⁶⁸

Tujuan dari Sosialisasi PUG ini adalah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai arti pentingnya penerapan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam segenap bidang kehidupan. Diharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini maka tidak ada lagi bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dimasyarakat kita. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa perempuan di negeri ini sering dihadapkan pada aturan sosial dan budaya masyarakat setempat yang lebih mengutamakan laki-laki. Padahal bisa jadi dari

⁶⁸ Arian Saputra, Gender dalam Pembangunan, *Jurnal Umum*, Vol 3 No. 2, 2016, h. 45.

segi kemampuan dan keterampilan, perempuan mungkin mampu mengungguli laki-laki. Tapi ya itu tadi, aturan sosial dan budaya tersebut telah bertahun-tahun tertanam kuat dan menjadikan gerak langkah perempuan untuk maju menjadi terhambat. Ambil contoh pada suatu keluarga miskin di daerah pedesaan yang memiliki anak laki dan perempuan. Kedua-duanya berkeinginan kuat untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, karena terbentur keadaan ekonomi dan hanya mampu menyekolahkan 1 anak saja, maka diambillah keputusan untuk menyekolahkan anak lelaki dengan asumsi bahwa anak laki-laki adalah tulang punggung keluarga yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Orang tua dari kedua anak tersebut mungkin berpikir bahwa pendidikan memang penting, tetapi ada yang keliru dari pemikirannya tersebut, yaitu mengalahkan keinginan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi hanya karena dianggap bahwa yang mampu menopang ekonomi keluarga itu adalah anak laki-laki. Itu hanya salah 1 contoh. Masih banyak lagi hal-hal diluar sana yang memperlihatkan bentuk ketidakadilan gender. Sungguh menyedihkan dan perlu ada agen-agen perubahan untuk mendobraknya. Tentu saja kesetaraan gender ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan perempuan lantas dapat bertindak dengan semau-maunya.

BAB IV

PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH

A. Konsep Pengarusutamaan Gender Menurut Inpres No.9 Tahun 2000

Isu gender merupakan perbincangan yang sudah lama ada dan bukan permasalahan baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita, tuntutan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai lini kehidupan menyebabkan banyak organisasi-organisasi perempuan yang lahir demi memperjuangkan hak-hak perempuan. hal ini membuat pemerintah harus bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada kaum perempuan untuk bisa lebih berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan sosial, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, pekerjaan dan juga dalam dunia politik.

Dalam rangka mendorong upaya pengarusutamaan gender, pemerintah mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 2000, yang memberikan amanat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu dilakukan startegi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh pembangunan nasional, karena pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan kegiatan yang sifatnya fungsional, baik dalam keluarga, masyarakat sosial, pendidikan, pekerjaan dan semua instansi dan lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

1. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan miniatur masyarakat umum. Bermula dari sinilah semua karakter yang ada pada diri manusia di bentuk, baik dan buruknya sifat seseorang akan terlihat dari hasil didikan yang di berikan keluarganya.

Orang tua merupakan seorang pendidik bagi anak-anaknya. Orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang hal-hal yang baik kepada anak-anak mereka, hal-hal yang boleh dan tidak boleh di lakukan dalam kehidupannya.

Keluarga memiliki pemimpin, yaitu suami. Suami adalah kepala keluarga yang menjadi panutan untuk semua anggota keluarganya, melindungi dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya, baik secara lahiriyah atau batiniyah.

Tetapi nyatanya masih banyak terjadi kasus tindak kekerasan yang di lakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya. Terutama terhadap istri, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁶⁹

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ada 4 (empat) macam:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasalnya berbunyi *“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana”*.⁷⁰

Pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pasal 12 Ayat 1 a,b,c,d Undang-Undang No.23 Tahun 2004, ada 4 (empat) upaya pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁶⁹ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (2).

⁷⁰ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 356.

- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.⁷¹

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pembelaan atas kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, dan beban pengasuhan anak.

2. Lingkungan masyarakat

Ketidakadilan yang terjadi terhadap kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat masih banyak di temui. Ketidakadilan gender ini sebagian besar dialami oleh para perempuan, hal ini sesuai dengan pendapat Michelle Rosaldo dimana ia mendefinisikan bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan secara universal mereka berada di bawah laki-laki.

Laki-laki lebih mendominasi karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik serta merendahkan perempuan ke lingkup domestik. Ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, dapat kita lihat dari berbagai ruang lingkup seperti Negara, masyarakat, budaya atau

⁷¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Pasal 12 Ayat (1 a,b,c,d).

keyakinan, publik atau tempat kerja, rumah tangga, dan keyakinan pribadi.

Suatu keyakinan gender yang sangat kuat pada berbagai ruang lingkup di atas akan berdampak luas bagi kehidupan dan hubungan gender antara laki-laki dan perempuan yang mana akan melahirkan sebuah stereotip terhadap laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut :

KEYAKINAN GENDER	BENTUK KETIDAKADILAN GENDER
Perempuan lembut dan bersifat emosional.	Tidak boleh menjadi pemimpin dalam sebuah instansi.
Pekerjaan utama perempuan adalah di rumah dan jikalau bekerja hanya membantu suami (nafkah tambahan).	Jika begitu maka boleh dibayar lebih rendah dan tidak perlu kedudukan yang penting.
Laki-laki memiliki watak tegas dan rasional	Cocok menjadi pemimpin dan tak pantas kerja di rumah.

a. Stereotip (stereotypes)

Stereotip adalah perlabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Dimana stereotip ini bisa merugikan pihak lain atau bahkan melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip ialah yang bersumber dari pandangan gender dimana akan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perempuan karena dengan perlabelah tersebut perempuan mengalami pembatasan, kesulitan dan pemiskinan. Misalnya , perempuan yang bersolek diasumsikan adalah untuk memikat perhatian

lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dihubungkan dengan stereotip ini.

b. Beban ganda (double burden)

Beban ganda disini erat kaitannya dengan beban kerja, yakni pembagian kerja atau pembagian tugas dan tanggungjawab yang selalu memberatkan salah satu jenis kelamin yakni perempuan. Dimana perempuan memiliki beban kerja yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki serta adanya anggapan bahwa perempuan secara alamiah yang memiliki sifat memelihara, merawat, mengasuh dan rajin yang mengakibatkan semua pekerjaan domestik (rumah tangga) menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

c. Marginalisasi (pemiskinan) perempuan

Marginalisasi memiliki arti suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Dimana pemiskinan yang dimaksud adalah suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi kaum (biasanya) perempuan.

Suatu proses marginalisasi itu juga disebut sebagai proses pemiskinan yang seringkali terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok tertentu. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.

Misalnya adalah banyak sekali perempuan yang bekerja sebagai guru, perawat, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja yang rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang diterima. Selain itu, selama ini terdapat sebuah anggapan bahwa perempuan tidak usah menempuh pendidikan tinggi karena nantinya juga akan berada di dapur (mengurus pekerjaan domestik).

d. Subordinasi (penomorduaan)

Secara umum, subordinasi merupakan keyakinan salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin yang lain. Misalnya terdapat keyakinan bahwa perempuan lebih rendah dan karenanya tidak sederajat dengan laki-laki.

Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi. berbagai bentuk subordinasi terhadap perempuan, antara lain :

- 1) Perempuan lebih banyak mengalami buta aksara dibandingkan laki-laki.
- 2) Laki-laki lebih bebas memilih pekerjaan daripada perempuan.
- 3) Mengurus pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan.

e. Kekerasan (violence) terhadap perempuan

Kekerasan bisa disebut juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut dapat terjadi baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.

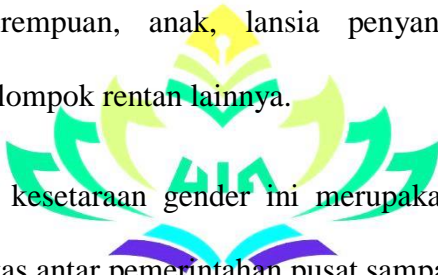
Adanya perbedaan karakter perempuan dan laki-laki dalam menjalankan perannya masing-masing yang di konstruksikan oleh masyarakat (peran gender) bahwa perempuan dianggap feminin dan laki-laki adalah maskulin. Karakter inilah sebagai wujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani tegas dan lain sebagainya.

Sebaliknya perempuan dianggap lemah lembut, cengeng, penurut, dan sebagainya. Berbagai anggapan yang dilekatkan oleh perempuan inilah yang mungkin dapat memicu seseorang atau dari lawan jenisnya untuk berbuat semena-mena kepada perempuan berupa tindak kekerasan.

Strategi pengarusutamaan gender sangat di perlukan guna memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, dan juga wilayah dapat ikut serta dan terlibat dalam proses pembangunan, sehingga di harapkan pembangunan yang di laksanakan dapat bermanfaat untuk semuanya,

dan semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Beberapa strategi pengarusutamaan gender yang di lakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini di antaranya pengarusutamaan gender perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), yakni pemerintah pusat melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan adanya keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya.



Karena kesetaraan gender ini merupakan *cross cutting issue*, maka sinergitas antar pemerintahan pusat sampai daerah juga berperan besar dalam meningkatkan daya ungkit pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara merata dan adil.

Masyarakat, termasuk akademisi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Akademisi mentransmisikan pengetahuan, nilai, norma, serta ideologi dan pembentukan karakter bangsa. Perguruan tinggi sesuai dengan peran dan tugasnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pengembangan ilmu riset, melakukan proses belajar mengajar dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui tugas inilah perguruan tinggi dapat membantu membangun meningkatkan pemahaman kesetaraan gender yang lengkap, yang mempunyai dampak positif pada pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa, sehingga akan di bawa dalam praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat.

3. Lingkungan pendidikan

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas manusia seutuhnya, adalah misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab profesional setiap guru.⁷² Guru tidak cukup hanya menyampaikan materi pengetahuan kepada siswa di kelas tetapi dituntut untuk meningkatkan kemampuan guna mendapatkan dan mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan profesinya. Mengajar bukan lagi usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan peserta didik agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal.

Perilaku yang tampak di dalam lingkungan sekolah dapat dijadikan indikator sejauh mana kesetaraan gender telah diterapkan di sekolah tersebut. Misalnya interaksi antara guru dengan murid atau murid dengan murid baik di dalam kelas maupun di luar kelas, pada saat pelajaran berlangsung maupun ketika jam istirahat akan menampilkan konstruksi gender yang selama ini dibangun. Selain itu, penataan

⁷² Mad Sa'i, "Pendidikan Islam dan Gender", *Islamuna*, vol. 2, no. 1 (2015), h. 121.

tempat duduk di dalam ruang kelas dan penataan barisan ketika upacara juga tidak terlepas dari hal tersebut. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang menentukan, misalnya memimpin organisasi kesiswaan, menjadi ketua kelas, memimpin jalannya diskusi dan lain sebagainya.⁷³ Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan gender yang muncul dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kesenjangan gender juga nampak dalam proses belajar mengajar, seperti kalimat-kalimat yang mengandung bias gender misalnya: Ibu memasak, Ani mencuci piring, Ayah pergi ke kantor, menegaskan bahwa adanya kesenjangan gender.⁷⁴ Seperti halnya hubungan guru dengan siswanya yang bias gender misalnya permintaan untuk mencuci taplak meja yang ada di kelas menjadi tugas siswa perempuan.

Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan Depdiknas sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah secara kelembagaan dan terutama guru. Dalam hal ini, diperlukan standarisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender.

⁷³ Khozin, *Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam Pendidikan Islam*, vol. 14, no. 2 (2011), h. 73.

⁷⁴ Veronika Incing, Willy Tri Hardianto, and Sugeng Rusmiwari, "Kesenjangan Gender (Perempuan) dalam Mendapatkan Pendidikan pada Masyarakat Pedesaan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 2, no. 1 (2013), h. 38.

4. Lingkungan pekerjaan

Budaya bangsa Indonesia masih menarik-narik “perempuan”, menjadikan perempuan termarginalisasi dan menjadikan perempuan sebagai subordinat. Pekerja perempuan dianggap warga kelas 2 (dua) karena budaya patriarki dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia masih kental. Namun pemikiran-pemikiran mengenai kesetaraan peran sudah mulai dikumandangkan dan semangat ini sudah terbakar untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, misalnya dalam masalah pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum untuk tidak adanya diskriminasi kerja, Pasal 5 “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”⁷⁵ maka Undang-Undang No.13 tahun 2003 menunjukkan komitmennya untuk menyediakan kesetaraan dalam kesempatan bekerja dengan tanpa diskriminasi baik itu laki-laki maupun perempuan.

Pekerja perempuan masih dianggap remeh dan dipandang tidak lebih baik daripada laki-laki. Bagaimanapun perusahaan harus memikirkan kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama. Perusahaan memiliki aturan [hukum](#) yang menyangkut kepada pekerja perempuan karena seringkali perusahaan melakukan keputusan yang sewenang-

⁷⁵ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5.

wenang dimana karena perempuan itu menikah, hamil dan/atau melahirkan mereka di-PHK oleh perusahaannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.Per.03/Men/1989 mengatur Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja Perempuan, dengan alasan berikut:

- a. Pekerja perempuan menikah,
- b. Pekerja perempuan sedang hamil
- c. Pekerja perempuan melahirkan.

Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan sesuai kodrat, harkat dan martabatnya dan merupakan konsekuensi logis dengan diratifikasinya konvensi ILO No.100 dan No.111 tahun 1951 tentang diskriminasi.

Dalam peraturan tersebut, pasal 3 No.Per.03/Men/1989 Pengusaha wajib merencanakan dan melaksanakan pengalihan tugas bagi pekerja wanita tanpa mengurangi hak-haknya bagi perusahaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan mempekerjakan pekerja wanita hamil.

Apabila perusahaan melanggar aturan ini maka yang demikian merupakan bentuk diskriminasi yang menyangkut kodrat perempuan. Kodrat perempuan dan laki-laki adalah makhluk ciptaan Tuhan dan sifatnya mutlak.

Apabila manusia menyalahi maka dapat dikatakan manusia tersebut menyalahi apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka tidak bisa apabila perusahaan memutuskan hubungan kerja kepada pekerja perempuan hanya karena perempuan itu menikah lalu hamil dan melahirkan dan dituangkan dalam kesepakatan peraturan perusahaan.

5. Dunia Politik

Kesempatan kerja pastinya harus ada di semua aspek [politik](#), ekonomi dan sosial namun sayangnya masih saja perempuan tersingkirkan saat mengembangkan potensinya dalam ranah politik karena peraturan yang sarat akan patriarkhi menghasilkan kebijakan yang tidak memberikan kesempatan dan tidak mengakomodir peran perempuan, misalnya kuota yang hanya 30% bagi caleg perempuan di setiap agenda 5 (lima) tahunan, pemilu.

Kuota 30 persen untuk perempuan di kepengurusan partai politik dan calon anggota legislatif dinilai tidak cukup memberikan impact kepada keterpilihan perempuan di parlemen. Pasalnya, sistem suara terbanyak membuat perempuan bertarung di gelanggang yang sama dengan laki-laki. “Padahal perempuan sampai hari ini masih hidup dalam ketidakadilan gender yang membuat mereka tidak punya akses dan modal sosial politik yang sama dengan laki-laki.

Pemahaman mengenai kesetaraan gender harus terus dilakukan. Khususnya oleh kaum muda perempuan, yang memiliki kesempatan untuk menjadi tulang punggung perubahan politik yang lebih baik

sekaligus menjadi elemen kunci memanifestasikan kesetaraan gender dengan meninggalkan penindasan berbasis gender. Dunia politik memang selalu dihubungkan dengan ranah publik yang relatif hanya untuk laki-laki dan perempuan hanya berada di ranah domestik, mengingat akar budaya mayoritas di Indonesia masih kental dan kuat dengan patriarki.

Budaya patriarki ini secara tidak sadar membentuk perbedaan perempuan dan laki-laki dengan perbedaan perilaku, otoritas, dan statusnya di mata masyarakat yang kemudian membentuk hierarki gender. Hal tersebutlah yang masih terikat dengan masyarakat kita. Patriarki tersebut membangun stigma yang merugikan pihak perempuan untuk terjun dan aktif berkarier di ranah politik dan menjadi pemimpin.

Perempuan dianggap individu yang sangat bergantung, lembut, tidak agresif dan berdaya serta hanya mengandalkan naluri. Tidak seperti laki-laki dengan individu yang memimpin, disiplin, agresif dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan agar bisa bergerak dalam dunia politik, termasuk menjadi pemimpin.

Sebagai negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi, tentunya Indonesia menjunjung tinggi kesempatan yang sama dalam segala hal termasuk menjadi pemimpin ataupun berpartisipasi di dalam kegiatan politik. Hal itu terlukis dari hadirnya UU Pemilu No 12

Tahun 2003 tentang Parpol pasal 65 ayat (1) yang memperjuangkan tindakan afirmatif dengan menyatakan bahwa setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon legislatif seperti DPR, DPRD provinsi dan kota untuk setiap wilayah pemilihan dengan mengamati keterwakilan perempuan 30% serendah-rendahnya.

Upaya ini dipandang sebagai langkah awal positif bagi perempuan agar bisa mengambil peran dan ikut serta berpartisipasi aktif di ranah publik. Walaupun pasal tersebut tidak melahirkan sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankannya, tetapi pasal ini berpengaruh dengan adanya peningkatan jaminan representasi perempuan dalam bidang politik.

Sehingga eksistensi perempuan tidak dipandang sebelah mata lagi dan meningkat dari objek politik menjadi subjek politik. Akhirnya, posisi perempuan dapat dibangun dengan perubahan yang progresif melalui aktivitas para aktivis perempuan dalam meningkatkan gerakan perempuan dalam kegiatan politik untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan 30%.

Bentuk diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya menyangkut kodrat, bukan hanya dalam aspek peran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tetapi juga apresiasi terhadap hasil kerja yang dihasilkan perempuan. Jarang sekali perempuan ditempatkan pada posisi sebagai Decision Maker walaupun mereka mampu atau bahkan lebih baik dari laki-laki.

Maka masih ada masalah sosial yang harus diselesaikan, karena kita masyarakat Indonesia alangkah baiknya apabila kita memanusiakan manusia dan melakukannya tanpa diskriminasi sebagaimana juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (3) “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.⁷⁶

B. Pengarustamaan Gender Terhadap Inpres No. 9 Tahun 2000 Dalam Prespektif Mubadalah

Permasalahan seputar diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan memang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum agama islam di turunkan atau lebih tepatnya pada zaman jahiliyah. Perempuan hanya dianggap sebagai barang yang tidak berharga, tidak mempunyai harga diri dan kehormatan di mata para laki-laki pada saat itu.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan dengan datangnya agama Islam, semua kezaliman terhadap perempuan yang ada pada masa jahiliyah sedikit demi sedikit di hapuskan dan perempuan di ruang, kesempatan dan di angkat derajatnya agar setara dengan laki-laki. Sehingga perlakuan-perlakuan yang bersifat menindas kaum perempuan bisa di hilangkan.

Sampai pada saat ini, permasalahan terkait kesetaraan gender masih banyak di perdebatkan, layak kah seorang perempuan di sandingkan sederajat

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (3).

dengan kaum laki-laki dalam sektor kehidupan sosial dan ikut serta dalam proses pembangunan dalam sebuah wilayah ataupun negara.

Dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender secara umum di katakan bahwa tujuan di laksanakan nya pengarusutamaan gender untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender yang sesuai dengan bidang, tugas serta kewenangan masing-masing.

Menurut perspektif mubadalah, kesetaraan atau pengarusutamaan gender yang di maksud dalam Inpres No.9 Tahun 2000 merupakan sebuah upaya dalam proses penyetaraan yang sesuai dengan dalil-dalil terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.



وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿٧٧﴾

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*⁷⁷

Seorang laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama di muka bumi ini, yakni menjadi khalifah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan segala bentuk pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak melanggar kodratnya masing-masing serta tidak melanggar aturan agama.

Penanaman pemahaman tentang kesetaraan gender seharusnya sudah di mulai sejak dini, terutama dalam lingkungan terkecil terlebih dahulu, yakni

⁷⁷ Q.S An-Nisa' : 124

lingkungan keluarga. Pendidikan dini terkait kesetaraan gender perlu di tanamkan dalam diri anak-anak karena di harapkan nanti ketika mereka menginjak usia dewasa, mereka sudah terbiasa dengan praktik kesetaraan gender yang ada di lingkungan luarnya baik dalam masyarakat ataupun dunia kerjanya.

Adanya aturan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak berarti menjadikan martabat kaum laki-laki menjadi jatuh dan tidak berharga, justru dengan adanya aturan yang mengatur permasalahan tersebut mereka bisa bekerja dan berkontribusi bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang di berikan, sehingga peroses pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih baik dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah di uraikan pada Bab I Sampai Bab IV, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang di dalamnya mengatur tentang isu kesetaraan gender, baik dalam ruang lingkup umum seperti masyarakat, politik, pekerjaan, pendidikan dan juga dalam keluarga. Peraturan tersebut seperti Inpres No.9 Tahun 2000, UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Serta memberikan berbagai penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.
2. Dalam perspektif mubadalah, sesuai dengan isi Inpres yang pertama, semua potensi yang di miliki laki-laki dan perempuan harus di kembangkan sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat yang sesuai dengan keahlian masing-masing, dan tetap menjaga etika dan perilaku yang positif, serta tidak melanggar ketentuan syari'at agama.

B. Saran

Untuk itu di perlukan upaya-upaya secara sistematis dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender melalui beberapa hal berikut.

Pertama, mengubah budaya dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengarusutamaan gender dalam kehidupan sosial, agar tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap perempuan. *Kedua*, mendukung secara penuh seluruh program yang di buat oleh menteri pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kader-kader perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Jalil, Imam Nakha'i, Dedy Wahyuddin, Asep Taufiqurrahman, Ahmad Harisuddin, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, Cetakan I, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cetakan III, Jakarta, AMZAH, 2013.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, cetakan I, Yogyakarta, IRCiSoD, 2019.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cetakan I, Jakarta, AMZAH, 2005.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, Cetakan I, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2001.
- Haider Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Cetakan I, Jakarta, Kencana, 2014.
- Hamka Hasan, *Tafsir Jender Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia Dan Mesir*, Cetakan I, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Cetakan II, Jakarta, Penamagani, 2001.
- Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Cetakan II, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Kairo Mesir, Erlangga, 2007.

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Persepektif Sosio Kultural*, Cetakan III. Tanjung-Barat-Jakarta Selatan. Lantabora Press, 2005.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008.

Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Cetakan III, Jakarta, Amzah, 2009.

M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008.

Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Cetakan II, Malang, Intrans Publishing, 2017.

Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Cetakan I Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Said Agil Hsuin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, cetakan ke II, Jakarta, Penamadani, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cetakan ke 23, Bandung, Alfabeta, 2016.

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, cetakan I, Bandung, Mizan, 2001.

Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah*, cetakan ke I, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997. Jurnal

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,

Perempuan dan Politik, *Jurnal Studi Politik*, Vol. I No.2, 2011.

H. Lomba Sultan, Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender (Studi Tentang Peran

Politik Wanita Muslimah), *jurnal Al-'Adl*, Vol. VIII No.1, Januari 2015.

Liky Faizal, Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Persepektif Al-Qur'an),

Jurnal TAPIS, Vol. XII No. 1, Januari-Juni 2016.

Maulana Syahid, Peran Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia, *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. IV No.1, November 2014.

M. Tohir Maloko, Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits, *Jurnal Al-Fikr*, Vol XVII No.1, Tahun 2013.

Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender dalam Persepektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap

Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol 13 No. 2, Desember 2013.

Shonhaji, Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesenjangan Sosial Pada Masyarakat

Multi-etnik Di Lampung, *Jurnal TAPIS*, Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2017.

Wayan Sudarta, Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender, *Jurnal Studi*

Gender Srikandi, Vol 3 No. 1, Januari 2003.

Waston Malau, Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan, *Jurnal Pendidikan*

Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 6 No. 2, 2014.

Internet

<https://www.kompasiana.com/yuliana95/58f13639917a61b22f870ef6/sejarah-kesetaraan-dan-keadilan-gender-di-indonesia>

[https://www.hipwee.com/narasi/pengaruh-perjuangan-kartini-pada-para-wanita-indonesia-](https://www.hipwee.com/narasi/pengaruh-perjuangan-kartini-pada-para-wanita-indonesia-masa-kini/)

[masa-kini/](https://www.hipwee.com/narasi/pengaruh-perjuangan-kartini-pada-para-wanita-indonesia-masa-kini/)

<http://sdc.binus.ac.id/bclc/2016/04/sejarah-singkat-ra-kartini/>

